



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB Periode 2014–2023

Gerindra Maulana Saputra^{1*}, Helmy Fuadi²

¹⁻² Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gerindramaulanasaputra@email.com

Abstract. *This study aims to “analyze the influence of Regional Original Income, Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Income on Regional Expenditure in regencies/cities in West Nusa Tenggara Province during the period 2014–2023.” The type of research applied is quantitative research through a causal associative approach. The data used is secondary data with panel data type sourced from the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance. The data analysis technique applied is panel data regression with the help of Eviews 12. The existing findings describe “partially Regional Original Income, Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Income have a positive and significant effect on Regional Expenditure in regencies/cities in West Nusa Tenggara Province during the period 2014–2023.” Then, “simultaneously the three variables also have a significant effect on Regional Expenditure in regencies/cities in West Nusa Tenggara Province during the period 2014–2023.”*

Keywords: *Balanced Funds; Legitimate Regional Revenue; Quantitative Analysis; Regional Expenditures; Regional Original Revenue.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan “untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2014–2023.” Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kuantitatif melalui pendekatan asosiatif kausal. Data yang diterapkan ialah data sekunder dengan jenis data panel yang bersumber dari Dirjenn Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang diterapkan ialah regresi data panel melalui bantuan Eviews 12. Temuan yang ada menjabarkan “secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2023.” Kemudian, “secara simultan ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2023.”

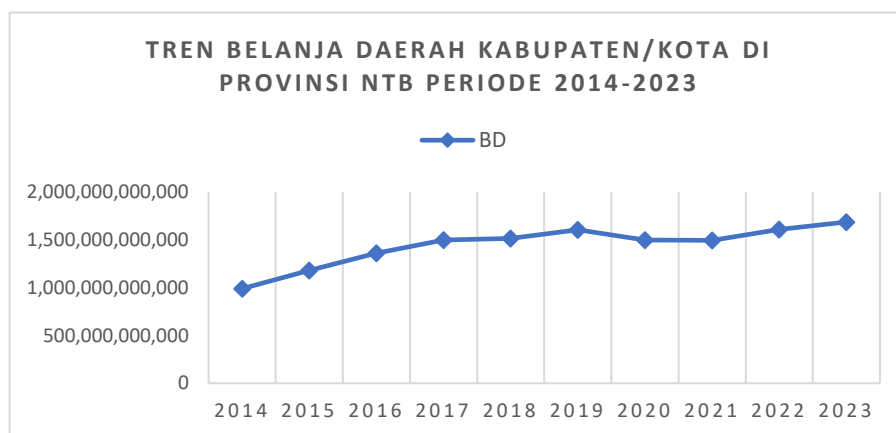
Kata kunci: Analisis Kuantitatif; Belanja Daerah; Dana Perimbangan; Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. LATAR BELAKANG

Memberikan lebih banyak wewenang pada pemerintah daerah dan kota dalam memberdayakan keuangan daerah merupakan tujuan dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat ditingkatkan dengan hal tersebut. Pengeluaran daerah bisa mencapai tujuan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wewenang pemerintah daerah untuk membelanjakan uang sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah mengelola pendapatan daerah asalnya, menyeimbangkan dana, dan pendapatan daerah sah lainnya (Sandrayati et al., 2024). Di Indonesia, desentralisasi fiskal pada dasarnya lebih berfokus pada pengeluaran, memberi pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola belanja daerah mereka sendiri. Sistem ini memberi pemerintah

daerah keleluasaan untuk menentukan alokasi anggaran mereka sesuai dengan kebijakan dan kondisi lokal (Christia & Ispriyarso, 2019).

Belanja daerah adalah komponen strategis dalam penggunaan desentralisasi fiskal yang menunjukkan seberapa baik pemerintah kabupaten/kota mengelola keuangan mereka. Belanja daerah menunjukkan prioritas kebijakan dan kapasitas fiskal daerah karena merupakan alat utama untuk menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pola dan dinamika belanja daerah menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan fiskal untuk mendukung proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Oleh karena itu, peningkatan belanja daerah menunjukkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah, serta jumlah sumber daya keuangan yang tersedia (Maulidiya & Seputra, 2019).



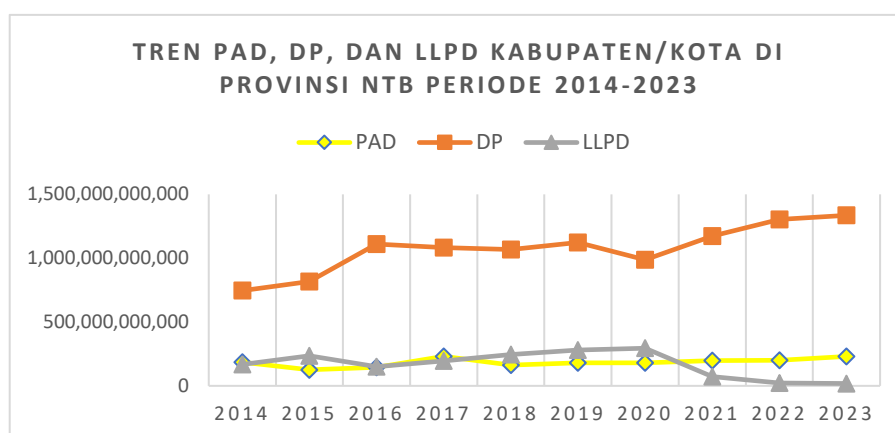
Gambar 1. Tren Belanja Daerah Kabupaten/kota Provinsi NTB Periode 2014-2023.

Sumber: DJPK, Data Diolah, 2026

Pengeluaran daerah oleh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat rata-rata dari tahun 2014 hingga 2023 (dengan sedikit variasi pada tahun-tahun tertentu), menurut nilai rata-rata. Dimulai dari 989,31 miliar IDR pada tahun 2014, pengeluaran daerah terus meningkat menjadi 1,60 triliun IDR pada tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran daerah sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan dan tata kelola daerah. Namun, belanja daerah menurun menjadi Rp1,50 triliun dan Rp1,49 triliun pada tahun 2020 dan 2021, yang dapat dikaitkan dengan penyesuaian kebijakan fiskal daerah karena tekanan eksternal, terutama pandemi COVID-19. Setelah periode tersebut, belanja daerah kembali meningkat menjadi Rp1,69 triliun pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan pemulihan kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal dan kemampuan belanja kabupaten dan kota dalam kerangka desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh pendapatan daerah. Tiga komponen utama tersusun

atas struktur pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD). “Pendapatan Asli Daerah” menjabarkan tingkat kemandirian fiskal daerah, “Dana Perimbangan” adalah sumber pendapatan utama yang mendukung operasi pemerintahan daerah, dan “Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah” berfungsi menjadi sumber pendukung yang bervariasi. Selain menunjukkan karakteristik fiskal suatu daerah, dinamika ketiga sumber pendapatan ini sangat penting untuk memahami kemampuan daerah dalam membiayai belanja pembangunan (Gaffar et al., 2025).



Gambar 2. Tren PAD, DP, dan LLPD Kabupaten/kota Provinsi NTB Periode 2014-2023.

Sumber: DJPK, Data Diolah, 2026

Perkembangan pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan pola yang berbeda antar sumber pendapatan. Dibandingkan dengan PAD dan LLPD, Dana Perimbangan menunjukkan tren meningkat yang relatif stabil dari tahun 2014 hingga 2023, dari 745,89 miliar menjadi 1,34 triliun. Meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam PAD dan LLPD. Sementara itu, PAD meningkat secara bertahap dari Rp185,63 miliar di 2014 menjadi Rp230,43 miliar di 2023, mengindikasikan upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah meskipun kontribusinya masih cukup kecil. Berbeda dengan PAD, LLPD menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dan cenderung menurun dari Rp72,70 miliar pada awal pengamatan menjadi sekitar Rp18,27 miliar pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan ini tidak stabil dan bergantung pada hal-hal yang bersifat sementara.

Meskipun tren nominal belanja daerah kabupaten/kota meningkat antara tahun 2014 dan 2023, keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan untuk mencapai efektivitas belanja daerah. Peningkatan kapasitas penerimaan daerah didorong oleh peningkatan belanja daerah, yang terutama didorong oleh Dana Perimbangan sebagai komponen utama struktur pendapatan daerah. Sebaliknya, PAD cenderung meningkat secara bertahap, tetapi kontribusinya relatif masih kecil. Sebaliknya, LLPD telah mengindikasikan

penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun belanja daerah terus meningkat, mereka sangat memerlukan transfer dari pemerintah pusat dalam membiayainya. Ketergantungan fiskal yang tinggi ini berpotensi membatasi fleksibilitas kebijakan belanja daerah dan menimbulkan perbedaan antara peningkatan belanja dan kemampuan daerah untuk tetap mandiri fiskal dalam jangka panjang (Amalyah & Suriadi, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji “hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan faktor-faktor keuangan daerah lainnya terhadap Belanja Daerah.” Rahmawatia et al. (2023) menjabarkan “PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau”, menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dapat mendorong belanja publik. Temuan serupa disampaikan oleh Yuliana & Asmara (2024) di Provinsi Jawa Timur, di mana “secara simultan PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, meskipun secara parsial hanya PAD dan Dana Perimbangan yang signifikan.” Juwari et al. (2021) di Kota Balikpapan juga menemukan bahwa “PAD berpengaruh positif dan signifikan, sementara Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan.” Hasil penelitian Ramadhan & Rahardjo (2024) di wilayah Sulawesi memperkuat temuan-temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa “PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.”

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa belanja daerah sebagian besar dipengaruhi oleh PAD, Dana Perimbangan, dan LLPD. Namun, temuan empiris masih menunjukkan ketidakkonsistenan, terutama terkait peran Dana Perimbangan dan LLPD. Kemudian, kebanyakan studi dilaksanakan di area dan waktu yang berbeda, sehingga memiliki karakteristik fiskal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara empiris, NTB menunjukkan belanja daerah yang cenderung meningkat dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan, sementara PAD meningkat secara bertahap dan LLPD bervariasi. Oleh karena itu, penelitian yang khusus perlu dilakukan “untuk mengetahui bagaimana PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdampak pada belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.”

Dari penjabaran tersebut, penelitian ini bertujuan “untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014–2023.” Meskipun kapasitas fiskal daerah terus meningkat, efektivitas alokasi belanja masih menghadapi kendala, terutama rendahnya serapan anggaran dan dominasi belanja operasional. Ketergantungan pada sektor tertentu juga membuat keuangan daerah rentan terhadap fluktuasi eksternal.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Desentralisasi Fiskal

Wallace E. Oates (2006), menyatakan bahwa gagasan desentralisasi fiskal menjabarkan langkah-langkah yang diambil pemerintah federal untuk memberikan kekuasaan atas keputusan perpajakan dan pengeluaran kepada pemerintah negara bagian dan regional. Premis teori ini adalah bahwa ketika pemerintah berada di tingkat komunitas, mereka lebih mampu menanggapi keinginan dan kebutuhan penduduk serta memanfaatkan sumber daya dan layanan yang tersedia dengan lebih baik. Dalam kerangka ini, pemerintah pusat tetap menjaga stabilitas dan pemerataan, sementara daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Teori desentralisasi fiskal relevan dengan penelitian ini karena kewenangan fiskal memungkinkan pemerintah daerah menentukan prioritas belanja berdasarkan kapasitas pendapatan mereka.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan dari pajak daerah, pungutan, dan pengelolaan aset daerah, serta Pendapatan Daerah sah lainnya, merupakan PAD. Relevan terhadap kebijakan dan ketentuan yang ada, PAD berakar dari daerah setempat. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD untuk meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah dan mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan pusat (Sinaga et al., 2020).

Dana Perimbangan

Untuk membantu daerah dalam memenuhi kebutuhannya selama desentralisasi, APBN menyediakan Dana Perimbangan. Semua daerah di Indonesia dapat memperoleh pembayaran penyeimbang dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran pusat dan daerah seimbang. Untuk mengawasi perekonomian daerah dan melaksanakan tanggung jawab pemerintahan, pemerintah daerah menggunakan dana penyeimbang dari sumber-sumber seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Sembiring et al., 2025).

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Di samping pendapatan asli dan transfer, LLPD tetap diakui secara hukum sebagai pendapatan daerah relevan terhadap ketentuan yang ada. Komponennya termasuk hibah, yang menjadi bantuan tidak mengikat dari pemerintah, lembaga, atau individu untuk kepentingan daerah, dana darurat yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk menangani keadaan darurat seperti bencana, dan pendapatan tambahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dana dari hasil provinsi atau pemerintah daerah lain dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan. Kemampuan keuangan daerah diperkuat oleh kelompok pendapatan ini untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik (Fauzi, 2021).

Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah dikategorikan sebagai belanja daerah berdasarkan jenisnya yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gaji yang dibayarkan kepada karyawan ialah contoh pengeluaran tidak langsung karena tidak langsung terkait terhadap implementasi program atau kegiatan tertentu. Kebalikan dari pengeluaran tidak langsung adalah pengeluaran langsung, yang mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang diimplementasikan pihak daerah. Pengorganisasian belanja daerah menurut jenisnya sangat penting untuk pengendalian anggaran dan proses pengawasan untuk mendukung manajemen anggaran (Maulidiya & Seputra, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengimplementasikan pendekatan kuantitatif melalui jenis studi asosiatif kausal. Tujuannya ialah “untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdampak pada belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Metode ini diterapkan dalam mengevaluasi hubungan sebab-akibat antara variabel berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik.

Data yang ada dihimpun dari “Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, yang dirilis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Laporan ini disusun dalam bentuk panel yang tersusun atas gabungan data time series dari tahun 2014 - 2023 dan data cross-section dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB. “Belanja Daerah” adalah variabel dependen dari penelitian ini. Sementara itu, variabel independen termasuk “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah yang Sah lainnya.”

Untuk analisis regresi data panel, software yang dimanfaatkan ialah EViews versi 12. Kombinasi uji Chow dan Pengali Lagrange digunakan untuk menentukan model regresi optimal. Peneliti menerapkan analisis parsial (uji-t) dan simultan (uji-F) untuk menentukan dampak setiap variabel setelah kami mentransformasikannya ke logaritma natural. Seberapa efektif faktor-faktor independen memengaruhi varians pengeluaran regional ditentukan dengan menggunakan koefisien determinasi. Sebagai berikut, model penelitian selesai dibuat:

$$\text{LogY}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 \log X_{2it} + \beta_3 \log X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- β_0 : Konstanta
 β_{1-3} : Koefisien Regresi
 Y : Belanja Daerah
 X_1 : PAD
 X_2 : Dana Perimbangan
 X_3 : LLPD
 i : Kabupaten/kota (10 Kabupaten/kota)
 t : Periode Waktu Penelitian (2014-2023)
 ε : Error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisi Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif.

	LOG_PAD	LOG_DP	LOG_LLPD	LOG_BD
Mean	25.74348	27.62780	25.36855	27.92259
Median	25.75230	27.60242	25.80307	27.97765
Maximum	27.32691	28.47155	27.05800	28.75897
Minimum	24.13331	26.75572	21.82188	27.03293
Std. Dev.	0.649427	0.392245	1.206204	0.395353
Observations	100	100	100	100

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Studi ini menggunakan 100 observasi untuk setiap variabel. Skor rerata PAD ialah 25,74, dengan median 25,75, nilai maksimum 27,33, nilai minimum 24,13, dan standar deviasi 0,65, yang menunjukkan variasi data moderat. Dana Perimbangan mempunyai skor rerata 27,63 dan median 27,60 dengan standar deviasi 0,39, yang menunjukkan sebaran data yang relatif homogen. LLPD memiliki nilai rata-rata 25,37 dan median 25,80, nilai maksimum 27,06 dan

minimum 21,82, dengan standar deviasi tertinggi 1,21. Ini menunjukkan keragaman data yang paling besar. Belanja Daerah, di sisi lain, memiliki nilai rata-rata 27,92 dan median 27,98, dengan standar deviasi 0,40, yang menunjukkan variasi data yang relatif rendah dan kemungkinan besar stabil.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tiga uji statistik diterapkan untuk menetapkan model regresi data panel yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow menetapkan apakah CEM atau FEM yang lebih baik, uji Hausman memilih antara FEM dan REM, dan uji LM membandingkan CEM dan REM.

a. Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.670064	(9,87)	0.1085
Cross-section Chi-square	15.936446	9	0.0682

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Temuan uji Chow menunjukkan CEM ialah model paling relevan untuk digunakan, skor cross-section chi-squarenya ialah $0,0682 > 0,05$. Maka, untuk membandingkan CEM dan REM, uji LM akan dilakukan selanjutnya.

b. Uji LM

Tabel 3. Hasil Uji LM.

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.432238 (0.5109)	41.20937 (0.0000)	41.64161 (0.0000)

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Menurut temuan uji Model CEM adalah yang paling tepat, karena nilai Breusch-Pagan adalah $0.5109 > 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

Pada analisis regresi data panel, Basuki & Prawoto (2016) menyatakan bahwa Pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi pengujian heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Ketika model regresi menyertakan lebih dari satu variabel independen, pengujian multikolinearitas dilakukan. Hal ini karena multikolinearitas sangat tidak mungkin terjadi dalam situasi di mana hanya ada satu variabel independen. Meskipun demikian, data cross-sectional sering menunjukkan heteroskedastisitas. Sangat penting untuk melakukan

pengujian heteroskedastisitas pada data panel untuk menjamin temuan estimasi regresi yang benar, karena data panel lebih menyerupai data cross-sectional daripada data time series.

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas.

	LOG_PAD	LOG_DP	LOG_LLPD
LOG_PAD	1.000000	0.543441	0.083887
LOG_DP	0.543441	1.000000	0.063245
LOG_LLPD			
D	0.083887	0.063245	1.000000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Temuan uji menjabarkan tidak ada multikolinearitas dalam penelitian ini. Skor koefisien korelasi untuk variabel LOG_PAD dan LOG_DP adalah 0.543441 di bawah 0,85, nilai koefisien korelasi untuk variabel LOG_PAD dan LOG_LLPD adalah 0.083887 di bawah 0,85, dan nilai koefisien korelasi untuk variabel LOG_DP dan LOG_LLPD adalah 0.063245 di bawah 0,85.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.536716	0.369462	1.452698	0.1496
LOG_PAD	0.017997	0.009380	1.918671	0.0580
LOG_DP	-0.029088	0.015507	-1.875880	0.0637
LOG_LLPD	-0.005604	0.004248	-1.319204	0.1902

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Temuan uji heteroskedastisitas menjabarkan skor probabilitas total variabel independen > signifikansi 5%, yaitu LOG_PAD yakni $0,0580 > 0,05$ yang meskipun nilainya mendekati batas signifikansi namun tetap dinyatakan lolos secara statistik, LOG_DP yakni $0,0637 > 0,05$, serta LOG_LLPD yakni $0,1902 > 0,05$. Bisa dijabarkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengindikasikan ada isu heteroskedastisitas, karena skor probabilitas seluruh variabel independen > 0,05.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dari temuan uji Chow dan uji LM yang sudah dilangsungkan, keduanya sama-sama menjabarkan model paling tepat ialah CEM. Temuan analisis melalui model CEM ialah seperti berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Data Panel.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.298700	0.554489	0.538693	0.5913
LOG_PAD	0.119567	0.014078	8.493405	0.0000
LOG_DP	0.850021	0.023272	36.52498	0.0000
LOG_LLDP	0.041847	0.006375	6.563956	0.0000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Dari temuan analisis regresi data panel, bisa didapat persamaan seperti berikut:

$$\text{LOG_BD} = 0,2987 + 0,1196\text{LOG_PAD} + 0,8500\text{LOG_DP} + 0,0418\text{LOG_LLPD} + e$$

Yang menjadikan temuan model persamaan regresi data panel bisa dideskripsikan seperti berikut:

- a. Konstanta = 0,2987

Konstanta mempunyai skor positif yakni 0,2987, mengindikasikan jika PAD, DP, dan LLPD dianggap tetap (konstan), maka BD akan meningkat sejumlah 0,2987%.

- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0,1196

Koefisien PAD mempunyai skor positif yakni 0,1196, mengindikasikan jika PAD meningkat 1%, maka BD akan meningkat yakni 0,1196%, melalui asumsi variabel DP dan LLPD tetap (*ceteris paribus*).

- c. Dana Perimbangan (DP) = 0,8500

Koefisien Dana Perimbangan mempunyai skor positif yakni 0,8500. Artinya, jika DP meningkat 1%, maka BD akan meningkat 0,85%, disertai asumsi variabel lainnya konstan.

- d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) = 0,0418

Koefisien LLPD mempunyai skor positif yakni 0,0418. Temuan tersebut mengindikasikan skor LLPD meningkat yakni 1%, maka BD akan meningkat yakni 0,0418%, disertai asumsi variabel lain tetap.

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

R-squared	0.963951
Adjusted R-squared	0.962825
S.E. of regression	0.076227
Sum squared resid	0.557820
Log likelihood	117.5506
F-statistic	855.6902
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Temuan uji koefisien determinasi menjabarkan variabel independen dapat memberikan kontribusi sebesar 96,28% dari variasi perubahan belanja daerah. Oleh karena itu, hanya 3,72% dari variasi belanja daerah yang dipengaruhi oleh aspppek lain di luar studi ini. Skor Adjusted R Square yang diperoleh adalah 0,962825.

Uji F (Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan).

R-squared	0.963951
Adjusted R-squared	0.962825
S.E. of regression	0.076227
Sum squared resid	0.557820
Log likelihood	117.5506
F-statistic	855.6902
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Skor probabilitas (Prob(F-statistic)) adalah $0.000000 < 0,05$. Temuan tersebut menjabarkan variabel independen sangat mempengaruhi belanja daerah sebagai variabel dependen.

Uji t (Parsial)

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.298700	0.554489	0.538693	0.5913
LOG_PAD	0.119567	0.014078	8.493405	0.0000
LOG_DP	0.850021	0.023272	36.52498	0.0000
LOG_LLPD	0.041847	0.006375	6.563956	0.0000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Skor signifikansi tiap variabel yakni 0,000 ($< 0,05$) menjabarkan seluruh variabel independen berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Ketiga sumber ini berperan penting dalam menentukan seberapa besar belanja daerah.

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil menjabarkan dari tahun 2014 hingga 2023, Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PAD. Ini ditunjukkan oleh skor koefisien regresi PAD yakni 0,1196 dan tingkat signifikansi 0,0000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan, dengan asumsi variabel lain tetap, peningkatan PAD yakni 1% bisa menghasilkan peningkatan Belanja Daerah yakni 0,1196%.

Hasil tersebut relevan terhadap teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates (2006) yang menjabarkan pelimpahan kewenangan fiskal pada Pemda bisa menjadikan daerah bisa mengelola pendapatan dan menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, PAD mencerminkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah. Kian besar PAD, akan kian besar pula fleksibilitas Pemda untuk meningkatkan Belanja Daerah. Temuan bahwa “PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah” menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan daerah diiringi oleh peningkatan alokasi belanja.

Temuan tersebut relevan terhadap studi yang diilaksanakan Yuliana & Asmara (2024) yang menemukan peningkatan belanja daerah dipengaruhi oleh PAD. Pemerintah daerah dapat memahami peran PAD karena kontribusinya menunjukkan kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal dalam bidang jasa, perdagangan, dan pariwisata. Oleh karena itu, peningkatan PAD seharusnya memberi pemerintah daerah lebih banyak uang untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Temuan yang ada menjabarkan bahwa Dana Perimbangan berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah disertai skor koefisien regresi yakni 0,8500 dan tingkat signifikansi 0,0000 ($< 0,05$), temuan tersebut menjabarkan, dengan asumsi variabel lain konstan, peningkatan 1 persen Dana Perimbangan akan menghasilkan peningkatan Belanja Daerah sebesar 0,85 persen. Dengan demikian, Dana Perimbangan menjadi sumber pendanaan utama untuk mendukung kapasitas belanja daerah.

Secara teoretis, temuan tersebut relevan terhadap teori desentralisasi fiskal Wallace E. Oates (2006) yang menganggap Dana Perimbangan sebagai alat pemerintah pusat untuk mengurangi perbedaan fiskal antara daerah dan memastikan pembiayaan pembangunan terus

berlanjut, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam situasi ini, transfer dana meningkatkan kemampuan belanja daerah, tetapi jika tidak dikombinasikan dengan upaya untuk meningkatkan PAD, itu dapat menyebabkan ketergantungan fiskal.

Temuan yang ada konsisten terhadap studi dari Rahmawatia et al. (2023) yang menemukan Dana Perimbangan memainkan peran penting dalam menopang belanja daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, karena basis pendapatan lokal yang terbatas, kebanyakan kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer pusat. Oleh karena itu, keberadaan Dana Perimbangan sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik terus berlanjut.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menjabarkan LLPD berdampak positif dan signifikan pada Belanja Daerah. Dengan koefisien regresi sebesar 0,0418 dan tingkat signifikansi 0,0000 ($< 0,05$), tiap peningkatan LLPD yakni 1% bisa meningkatkan Belanja Daerah yakni 0,0418%. Maka, melalui asumsi variabel lain tetap, peningkatan LLPD 1% bisa meningkatkan Belanja Daerah yakni 0,0418 %.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates (2006), yang menegaskan bahwa kewenangan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan mereka memanfaatkan seluruh sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan daerah. Meskipun LLPD bukan menjadi sumber utama dan bersifat tidak rutin, penerimaan ini tetap menambah kapasitas fiskal daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, setiap peningkatan kapasitas pendapatan baik yang bersifat reguler maupun non-reguler akan memperluas ruang fiskal Pemda untuk meningkatkan belanja publik relevan terhadap prioritas dan karakteristik wilayahnya.

Temuan tersebut sejalan terhadap studi Ramadhan & Rahardjo (2024) yang menemukan “Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memainkan peran yang signifikan dalam mendukung belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi.” Sebaliknya, studi yang dilangsungkan oleh Juwari et al. (2021) menjabarkan hubungan antara LLPD dan Belanja Daerah Kota Balikpapan cenderung tidak signifikan dan bahkan bernilai negatif, menunjukkan bahwa ada perbedaan konteks.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan yang ada menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2023, belanja daerah di semua kabupaten dan kota di Provinsi NTB akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PAD, Dana Perimbangan, dan LLPD. Pengaruh ini terjadi baik parsial maupun bersamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja daerah lebih besar jika mereka memperoleh lebih banyak PAD. Selain itu, ketika Dana Perimbangan dari pemerintah pusat meningkat, kemampuan fiskal daerah juga lebih baik. Dengan cara yang sama, peningkatan LLPD secara signifikan berkontribusi pada peningkatan belanja daerah. Secara keseluruhan, ketiga sumber pendapatan tersebut sangat penting dan signifikan dalam menentukan jumlah belanja daerah, yang menunjukkan betapa bergantungnya belanja pemerintah daerah pada kemampuan dan struktur pendapatan yang dimilikinya.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat menerapkan metode analisis yang lebih beragam, dan variabel lain yang dapat memengaruhi kebijakan belanja pemerintah daerah, seperti angka penduduk, IPM, taraf kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Amalyah, D. R., & Suriadi, I. (2025). Dinamika pendapatan asli daerah dan transfer fiskal terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Lombok pada tahun 2015–2024. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 25(2), 299–312. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v25i2.27951>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis*. RajaGrafindo Persada.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). Realisasi APBD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Fauzi, F. (2021). Efek pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi di kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 s/d 2017. *CASH: Economic, Accounting Scientific Journal*, 4(1), 55–67. <https://doi.org/10.52624/cash.v4i01.1782>
- Gaffar, A. N., Adriansyah, Yusuf, Y. Y., Faisal, A., & Asmar. (2025). Analisis efektivitas penerimaan pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 berdasarkan data DJPK Kemenkeu. *JEINSA: Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang*, 4(2), 288–298. <https://doi.org/doi.org/10.61912/jeinsa.v4i2.274>
- Juwari, S., Susilowati, D., & Sitinjak, C. A. D. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana

- perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 115–126. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.149>
- Maulidiya, T. E., & Seputra, R. Y. A. (2019). Pengaruh investasi dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajaemen dan Sosial*, 2(2), 1–11.
- Oates, W. E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. *IFIR WORKING PAPER SERIES*.
- Rahmawatia, W., Masril, & Piliang, A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2018–2022. *JUKIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 86–94. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.707>
- Ramadhan, M. N., & Rahardjo, S. N. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi (periode 2019–2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–11.
- Sandrayati, A. Y., & Soleh, R. R. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal terhadap fiscal stress di Provinsi Sumatera Selatan. *Bridging: Journal of Islamic Digital Economic and Management*, 1(2), 11–25.
- Sembiring, R. T., Mustika, I. G., & Helmi, S. M. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Barat. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(2), 2862–2873. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5850>
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.350>
- Yuliana, A. S., & Asmara, K. (2024). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 540–551. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.25189>